

# Kaesang Tunjuk Anak Buya Mahyeldi PKS Jadi Ketua PSI Sumbar

Category: NASIONAL

written by Redaksi | 16/10/2025



**BANDA ACEH –** Langkah [Politik](#) mengejutkan datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep resmi menunjuk Taufiqur Rahman, anak Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumbar. Penunjukan tersebut diumumkan pada Rabu, 15 Oktober 2025, dalam acara konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiq mengunggah foto kebersamaannya dengan Kaesang dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni melalui akun media sosialnya.

Kabar ini dikonfirmasi oleh mantan Ketua DPW PSI Sumbar, Sukma Trianda Putra, yang menyebut keputusan tinggal menunggu terbitnya surat keputusan (SK) resmi dari DPP PSI.

“Iya benar, sekarang tinggal menunggu SK,” ujar Sukma, Kamis

(16/10/2025).

Sosok Taufiqur Rahman bukan nama asing di panggung politik Sumbar. Ia merupakan anak keempat Mahyeldi—tokoh senior Partai Keadilan Sejahtera ([PKS](#)) yang kini menjabat Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumbar.

Sebelumnya, Taufiq sempat mengikuti jejak ayahnya dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sumbar dari PKS pada [Pemilu 2024](#), namun gagal meraih kursi. Kini, langkah politiknya berbelok tajam ke PSI—partai yang secara ideologis kerap berseberangan dengan PKS.

Sukma Trianda menilai kehadiran Taufiq membawa semangat baru bagi PSI di Sumbar.

“Sosok muda seperti Taufiq diharapkan memperkuat PSI dalam [Pileg](#) mendatang. Semangatnya mewakili energi muda menyongsong Indonesia Emas,” katanya.

Namun di tingkat publik, keputusan ini menimbulkan beragam tafsir. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk regenerasi politik lintas ideologi, sementara sebagian lain menilai langkah itu mencerminkan cairnya batas politik identitas di Sumatera Barat.

Bagi Sumbar, wilayah yang dikenal religius dan kuat secara politik ideologis, manuver ini tentu menantang pola lama. PSI kini memegang kartu baru – bukan sekadar partai muda, tetapi juga partai yang berani menabrak garis batas konvensional politik lokal.